



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2026/Periodik - 2025)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA (BMKG)  
**UNIT KERJA** : KEDEPUTIAN BIDANG MODIFIKASI CUACA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **Tri Handoko Seto**
2. Jabatan : **DEPUTI**
3. NHK : **433238**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 7.496.000.000**

1. Tanah Seluas 1.729 m2 di KAB / KOTA BANYUWANGI, HASIL SENDIRI Rp. 474.000.000
2. Tanah Seluas 714 m2 di KAB / KOTA BANYUWANGI, HASIL SENDIRI Rp. 354.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 227 m2/240 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 3.120.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 50 m2/100 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.548.000.000
5. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA BANYUWANGI, HASIL SENDIRI Rp. 410.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
7. Tanah Seluas 11.200.000 m2 di KAB / KOTA KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 590.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 975.000.000**

1. MOTOR, Honda Vario Techno Tahun 2015, WARISAN Rp. 5.000.000
2. MOBIL, MAZDA CX-3 Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000



3. MOBIL, TOYOTA RAIZE Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.  
170.000.000

4. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.  
500.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 660.000.000

D. SURAT BERTAGIH Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 438.451.086

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 9.569.451.086

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 9.569.451.086

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.